

# Bab I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan hidup Tahun 2019, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Lingkungan Hidup yang telah disiapkan satu tahun sebelumnya adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansi penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renja SKPD adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 7) Permendagri No. 18 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
- 8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
- 9) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 30);
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
- 12) Pergub Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun berjalan (2018) dan untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran sehingga dana APBD yang teralokasikan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2019 ini dapat terserap secara optimal untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan baik di dalam dokumen RPJMD maupun di dalam dokumen renstra.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD (KUA-PPAS APBD) Tahun 2019 .

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Bab I PENDAHULUAN
  - a. Latar Belakang
  - b. Landasan Hukum
  - c. Maksud dan Tujuan
  - d. Sistematika Penulisan
2. Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
  - a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
  - b. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - c. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
  - d. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
  - e. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
3. Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
  - a. Telaahan terhadap kebijakan nasional
  - b. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
4. Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
5. BAB IV PENUTUP

## BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam mengevaluasi pelaksanaan seluruh program Lingkungan Hidup, dapat dilihat melalui tercapainya indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dan memberikan gambaran peranan lingkungan hidup terhadap prioritas pembangunan daerah, sehingga upaya untuk mendorong keterkaitan antara program terus dilaksanakan, dimana keberhasilan satu program akan meningkatkan keberhasilan program lainnya, dan sebaliknya kegagalan salah satu program juga akan menurunkan capaian keberhasilan program lainnya. Dengan demikian sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan pembangunan lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat merupakan organisasi perangkat daerah yang mengalami perubahan nomenklatur dari Bapedalda Prov. Sumatera Barat pada akhir tahun 2016. Untuk pelaksanaan evaluasi renja, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sudah menggunakan renstra tahun 2017-2021 namun untuk realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d Tahun (n-3) masih menggunakan renstra Bapedalda 2016-2021.

DLH Prov. Sumbar pada tahun 2017 memiliki pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 13.248.968.797 dengan rincian dan realisasi terlihat seperti tabel berikut :

Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi Tahun 2017

No	Jenis Belanja	Pagu Dana Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase (%)	Realisasi Fisik (%)	Sisa Dana (Rp)
1	Belanja Tidak Langsung	5.367.471.493	4.960.134.782	92,41	100	407.336.711
2	Belanja Langsung	7.881.497.304	7.648.396.123	97,04	100	233.101.181
	a. BL Pokok	3.240.567.604	3.084.682.267	95,19	100	155.885.337
	b. BL Kegiatan	4.640.929.700	4.563.713.856	98,34	100	77.215.844
	TOTAL	13.248.968.797	12.608.530.905	95,17	100	640.437.892

DLH prov. Sumbar pada tahun 2017 telah melaksanakan 4 (empat) program utama yang tercantum dalam penetapan Kinerja. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD DLH tahun 2017 dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

- a. Sampai dengan akhir tahun 2017, dari 10 program dan 54 kegiatan yang dilaksanakan oleh DLH semua realisasi fisiknya mencapai 100% dan realisasi anggaran sebesar 95,17%. Realisasi fisik kegiatan yang mencapai 100% ini merupakan hasil dari upaya seluruh aparatur Dinas LH Provinsi Sumatera Barat yang dengan komitmen tinggi melaksanakan seluruh kegiatan seefektif dan seefisien mungkin

- b. Hasil evaluasi capaian pelaksanaan Renja OPD DLH tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel. 2.2  
 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2018  
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2017-2021	Realisasi Target Kinerja hasil program dan kegiatan s/d Tahun 2016 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017 (tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Tahun berjalan (2018)			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 (tahun n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun berjalan /tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11)=(10/4)		
	<b>Lingkungan Hidup</b>											
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD</b>										
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Materai, paket pengiriman surat dan BBM yang disediakan	60	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	36	60%
	Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	Pembayaran rekening listrik, telepon, air, faximile, internet	60	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	36	60%
	Penyediaan jasa kebersihan, Pengaman dan sopir kantor	Jumlah pembayaran honorarium jasa kebersihan, tenaga pengaman dan sopir kantor	65	bulan	13	bulan	13	bulan	100%	12	38	58%
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	36	60%
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya Barang cetak dan penggandaan	60	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	36	60%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen listrik/penerangan	54	komponen	6	komponen	6	komponen	100%	6	18	33%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah media/surat kabar harian yang disediakan	60	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	36	60%
	Penyediaan makan dan	Tersedianya makan dan minum	60	bulan		bulan		bulan	100%	12	36	-

minum	kantor			12		12		12					
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah, pelaksanaan Bintek dan sosialisasi dalam dan luar propinsi	terlaksananya konsultasi dan koordinasi kedalam dan luar provinsi	189	kali	40	kali	35	bulan	47	bulan	134%	37	124	-
Penyediaan Tenaga Sopir	Pembayaran honorarium Jasa tenaga Sopir	48	bulan	-	bulan	-	bulan	-	bulan	-	13	13	27%
Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	Pembayaran honorarium Jasa Pengaman Kantor	48	bulan	-	bulan	-	bulan	-	bulan	-	13	13	27%
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD</b>												
Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor bapedalda	2	paket	1	paket	1	paket	1	paket	100%	0	2	100%
Pengadaan meubeleu	Jumlah unit meubeleu yang di adakan	16	jenis	0	jenis	-	jenis	0	-	-	4	4	-
Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi	Tersedianya PC dan laptop/note book, printer, scanner	18	jenis	0	jenis	-	jenis	0	-	-	3	3	-
Pengadaan kendaraan Dinas	Jumlah unit Kendaraan yang diadakan roda empat roda dua	2	unit			-	unit	0	-	-	0	0	0%
Pengadaan Alat Studio, Komunikasi dan Informasi	Tersedianya alat-alat studio dan Komunikasi dan informasi	32	unit	0	unit	-	unit	0	-	-	8	8	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pengecatan kantor, pemeliharaan pekarangan	40	paket	7	paket	7	paket	7	paket	100%	7	21	53%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional	Tersedianya suku cadang dan pajak/STNK serta asuransi kendaraan	6	unit	6	unit	6	unit roda empat	6	unit roda empat	100%	6	18	300%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Terlaksananya pemeliharaan instalasi listrik, telepon dan air	60	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	36	60%
Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi	Terlaksananya pemeliharaan komputer dan jaringan komputerisasi	5	jenis	0	jenis	-	jenis	0	-	-	5	5	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan AC, komputer dan jaringan komputerisasi	27	unit	7	unit	25	unit	47	unit	188%	27	81	300%
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Pembayaran honor pengawasan dan pengendalian aset SKPD	60	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	36	60%
Penataan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah bahan kelengkapan penetapan arsip Bapedalda	50	meter lari	10	meter lari	10	m lari	10	m lari	100%	10	30	60%

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	35	jenis	3	jenis	7	jenis	7	jenis	100%	0	10	29%
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD</b>												
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas PNS dan PTT	428	stel	70	stel	67	stel	67	stel	100%	64	201	47%
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>Terwujudnya peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD</b>												
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah keikutsertaan aparatur dalam mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	83	kali	31	kali	14	kali	15	kali	107%	14	60	72%
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian</b>	<b>Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD</b>												
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja Bapedalda	9	dokumen	8	dokumen	8	dokumen	8	dokumen	100%	9	25	278%
	Penata usahaan keuangan SKPD	Pembayaran honorarium pengelolaan keuangan	60	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	36	60%
	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Bapedalda	8	dokumen	9	dokumen	7	dokumen	9	dokumen	129%	9	27	338%
	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>IKLH</b>											0	
	Pengawasan Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Jumlah objek/kegiatan yang dilakukan wasdal terhadap kerusakan lingkungan (lahan pertambangan dan lahan akses terbuka)	77	objek	13	objek	9	objek / kegiatan	9	Objek	100%	13	35	45%
	Pengkajian Penetapan Status Mutu Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah sungai yang dikaji dalam rangka penetapan status mutunya	7	sungai	2	sungai	1	sungai		sungai	100%	0	3	43%
		Pergub status mutu air sungai lintas kab/kota	-	-	-	-	1	pergub	1	Pergub	100%	0	1	-
	Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi	Jumlah sungai yang dipantau	72	sungai	6	sungai	8	sungai	8	sungai	100%		14	19%

			Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penurunan Beban Pencemaran Sungai	Terbentuknya rencana teknis pemulihan sungai Batang Agam (klaster pengelolaan limbah cair)	11	klaster	1	klaster	1	klaster pengelolaan limbah cair domestik	1	klaster pengelolaan limbah cair domestik	100%	1	3	27%
				Jumlah peserta sosialisasi klaster	60	orang			60	orang	60	orang		0	60	
			Pengawasan pengendalian terhadap pengelolaan lingkungan usaha/kegiatan	Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan wasdal pengelolaan lingkungan	110	kegiatan / usaha	13	kegiatan / usaha	12	kegiatan / usaha	27	kegiatan/ usaha	225%	10	50	45%
			Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah)	Jumlah objek kegiatan yang dinilai kinerja pengelolaan lingkungan hidupnya	108	kegiatan	15	kegiatan	30	objek/kegiatan	30	objek/kegiatan	100%	35	80	74%
			Pemantauan Kualitas Udara Ambient	Jumlah Kab/Kota yang dipantau kualitas udara ambiennya	114	kab/kota	19	kab/kota	18	Kab/Kota	18	Kab/Kota	100%	19	56	49%
			Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Adipura)	Jumlah Kab/Kota yang akan dilakukan pembinaan dan evaluasi	94	kab/kota	13	kab/kota	14	Kab/Kota	14	kabupaten/kota	100%	15	42	45%
			Peningkatan Program Pelindungan Lapisan Ozon dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim.	Jumlah Kab/Kota yang teridentifikasi pemakaian bahan perusak ozon pada bengkel service peralatan pendingin	101	kab/kota	15	kab/kota	17	Kab/Kota	17	kabupaten/kota	100%	0	32	32%
			Peningkatan Peran Serta bank sampah Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kab/Kota yang dibina terkait aplikasi bank sampah dan peningkatan implementasi konsep 3R dan jumlah bank sampah yang dibangun	113	kab/kota	18	kab/kota	18	Kab/Kota	19	kab/kota	106%	0	37	33%
			Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih	Terlaksananya penilaian kecamatan/kelurahan bersih Tk. Provisi	107	kel/kec	10 14	Kecamatan kelurahan	12 13	Kecamatan kelurahan	12 13	Kecamatan kelurahan	100% 93%	19		46%
			Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dasar dan menengah dalam pelestarian lingkungan hidup	Jumlah sekolah yang dibina/dinilai dalam program adiwiyata	448	sekolah	153	sekolah	65	sekolah	183	sekolah	282%	40	376	84%
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Jumlah Kab/Kota yang akan dilakukan pembinaan dan evaluasi	114	kab/kota	19	kab/kota	19	kab/kota	19	kab/kota	100%	19	57	50%
			Peningkatan Pengembangan Laboratorium Lingkungan	Jumlah kab/kota yang laboratorium/Laboratorium DAK dilakukan pembinaan	77	kab/kota	13	kab/kota	11	laboratorium	12	laboratorium	109%	12	37	-

Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah peserta rapat koordinasi pengelolaan lingkungan hidup,	420	orang	80	orang	70	orang peserta	67	orang	20%	67	214	51%
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi	114	kab/kota	16	kab/kota	19	kab/Kota	19	Kab/Kota	20%	19	54	47%
Program Kampung Iklim	Jumlah Nagari/Jorong/Korong (calon kampung iklim) yang dibina dalam pelaksanaan kegiatan Program Kampung Iklim	27	kab/kota	0	kab/kota	12	kab/kota	12	kab/kota	100%	19	31	-
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca sektor Pengelolaan Limbah	Jumlah Kab/Kota yang diinventarisasi data penurunan emisi GRK bidang pengelolaan limbah	19	kab/kota	19	kab/kota	19	Kab/Kota	19	kabupaten/kota	100%	19	57	300%
Pilot projek ekodan eduwisata kawasan Mandeh	Pembangunan Bank Sampah	1	bank sampah	-	-	1	bank sampah	0	-		0	0	
<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	<b>IKLH</b>												
Peningkatan Konservasi kualitas air danau di Provinsi Sumatera Barat	Jumlah danau yang dikoordinasikan peranserta stakeholder, masyarakat dan dunia usaha-nya dalam pelestarian ekosistem danau	4	danau	4	danau	4	danau (Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau Diatas dan Danau Dibawah)	4	danau	100%	4	12	300%
Peningkatan Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Laut	Jumlah Kab/Kota kawasan pesisir pantai dan muara sungai yang dipantau kualitas air lautnya	6	kab/kota	6	kab/kota	6	Kab/Kota	6	Kab/Kota	100%	6	18	300%
Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (Penerapan CSR Bidang Lingkungan Hidup)	Jumlah perusahaan yang dibina dalam pelaksanaan program CSR bidang lingkungan hidup	8	perusahaan	11	perusahaan	6	perusahaan	8	perusahaan	133%	10	29	363%
Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Sumatera Barat	Jumlah taman kehati yang dibina	8	kab/kota	4	kab/kota	4	Kab/Kota	4	kab/kota	100%	4	12	150%
<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase pengembangan sistem dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup</b>												

Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru)	Jumlah usulan calon penerima Kalpataru Tk Nasional dari Provinsi Sumbar yang dibina	47	orang/kel	8	orang/kel	8	orang/kelompok	8	orang/kelompok	100%	9	25	53%
Penyusunan Data dan analisis kualitas lingkungan provinsi Sumatera barat	Jumlah buku SLHD Prov. Sumbar Tahun 2016 yang dicetak	160	buku	80	buku	700	buku	0	buku	0%	40	120	75%
	Draft buku data SLHD Prov. Sumbar Tahun 2017	1	-	0	-	1	Draft buku data SLHD Tahun 2017	0	Draft buku data SLHD Tahun 2017	0%	1	1	-
	Jumlah peserta bimtek	0	-	0	-	50	orang	50	orang	100%	5	55	
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Terlaksananya rangkaian acara edukasi dan kampanye lingkungan hidup	5	even	1	even	1	even	1	even	100%	1	3	60%
Pegembangan Sistim Informasi Lingkungan	Jumlah paket pengembangan Sistem Informasi Lingkungan	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket	100%	0	2	200%
<b>Program Penaatan Hukum Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan</b>												
Pembinaan dan Evaluasi kinerja penatalaksanaan proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hidup	Jumlah kabupaten/kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL-nya	19	kab/kota	12	kab/kota	9		12	kabupaten/kota	133%	12	36	189%
	Jumlah kabupaten/kota yang dibina/diverifikasi terkait pengajuan lisensi Komisi Penilai Amdal-nya	13	kab/kota	7	kab/kota	5	kabupaten/kota	7	kabupaten/kota	140%	6	20	154%
Pembinaan KLHS Terhadap Dokumen Perencanaan	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dan/atau dibina untuk penerapan KLHS terhadap dokumen perencanaan	7	kab/kota	5	kab/kota	7	Kab/Kota	7	kabupaten/kota	100%		12	171%
Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan	Jumlah Kab./Kota yang dievaluasi dalam pembinaan hukum dan perizinan serta terhimpunnya data hasil pembinaan hukum dan perizinan	6	kab/kota	6	kab/kota	6	kabupaten/kota	8	kabupaten/kota	133%	10	24	400%
	Jumlah pemilik kegiatan dan/atau usaha yang dilakukan pembinaan dan menaati peraturan bidang lingkungan hidup dan perizinan.	6	objek	6	objek	5	objek	8	objek	160%	8	22	367%



Berdasarkan tabel diatas, secara keseluruhan capaian kinerja Tahun 2017 dianggap berhasil meskipun ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya terlambat oleh faktor teknis diluar kontrol perencanaan, namun dengan upaya, strategi dan peningkatan koordinasi yang dijalankan oleh jajaran Dinas LH Provinsi Sumatera Barat kendala dan hambatan dapat dicarikan jalan pemecahannya. Berikut beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2017 :

1. Terdapat 2 (dua) kegiatan yang targetnya tidak dapat direalisasikan sesuai perencanaan yang telah ada yakni kegiatan pilot projek eko dan eduwisata kawasan mandeh dan kegiatan pengembangan sistim informasi lingkungan.

Kegiatan pilot projek eko dan eduwisata kawasan mandeh tidak dapat dilaksanakan karena belum adanya kejelasan terhadap lokasi yang akan dijadikan bank sampah sementara untuk kegiatan pengembangan sistim informasi lingkungan, pembuatan aplikasi tupoksi sekarang berada pada Dinas Kominfo.

2. Walaupun tidak terealisasinya kedua kegiatan tersebut sesuai perencanaan, namun salah satu target dari kegiatan Pengembangan Sistim Informasi Lingkungan dapat dikatakan berhasil dicapai karena aplikasi Sistem Informasi Perizinan Lingkungan Hidup (SIPLH) telah berhasil dibuat berkat kerjasama dengan Dinas Kominfo.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis kinerja pelayanan SKPD menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra DLH Tahun 2017-2021, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD, dan/atau indikator lainnya seperti MDG's ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah, yang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, dimana pelayanan dasar bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat merupakan organisasi perangkat daerah yang mengalami perubahan nomenklatur dari Bapedalda Prov. Sumatera Barat pada akhir tahun 2016. Untuk kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup baru dapat dilihat dari capaian kinerja Tahun 2017 berdasar cascading yang telah disempurnakan pada triwulan III Tahun 2017 yang lalu. Capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Sasaran 1			
Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbar	35 %	46,80 %	133,71
Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan	74 %	100 %	135,13
Sasaran 2			
Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan	10 %	9,34%	93,4
Indeks Pencemaran Air (IPA)	5 < IPA < 10	3,07	100
Indeks Pencemaran Udara (IPU)	IPU < 11	7,155	100
Sasaran 3			
Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi lingkungan hidup			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria	32%	32%	100
Sasaran 4			
Meningkatnya kapasitas dan peranserta <i>stakeholders</i>			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Persentase peningkatan jumlah masyarakat / kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	15%	28,92%	192,81%
Sasaran 5			
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Nilai Evaluasi AKIP OPD	B	B	100
Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan	95%	97,59%	102,72%
<b>% Capaian rata-rata</b>			<b>117,53%</b>

Dari tabel 2.3 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja rata-rata untuk 9 indikator kinerja yang mengukur keberhasilan 5 sasaran strategis (SS) tahun 2017 adalah **117,53%**. Rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 117,53% tersebut termasuk dalam klasifikasi berhasil dengan kategori sangat baik atau dengan kata lain tidak ada indikator kinerja yang tergolong gagal (tingkat capaian >93%).

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD maupun hasil kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD, untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dan untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Berdasarkan permasalahan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkungan hidup yang dihadapi Prov. Sumbar maka dirumuskan isu strategis lingkup pelayanan Prov. Sumbar sebagai berikut :

1. Terkait masalah perubahan kualitas air. Menurunnya kualitas air sungai segmen perkotaan terutama Sungai Batang Agam, Batang Anai, Batang Ombilin dan Batang Pangian. Penurunan kualitas dapat dilihat dari nilai Indeks Kualitas Air (IKA) 4 (empat) sungai yang dilakukan pemantauan oleh Dinas LH yakni: Sungai Batang Agam, Sungai Batang Anai, Sungai Batang Pangian dan Sungai Batang Ombilin. Kondisi terakhir pada tahun 2015 memperlihatkan bahwa IKA terendah adalah Sungai Batang Agam yakni sebesar 61,40, dan IKA tertinggi adalah Sungai Batang Ombilin yakni 72,44. Hal ini disebabkan pencemaran limbah domestik, baik limbah cair maupun limbah padat. Limbah domestik perkotaan merupakan gabungan dari limbah rumah tangga, limbah perhotelan, rumah sakit dan Rumah Potong Hewan (RPH). Parameter pencemar dominan adalah Fecal Coli dan Total Coliform, dengan kategori cemar berat, terutama yang berada pada segmen Kota Bukittinggi dan beberapa titik di Kabupaten Agam.

Isu menurunnya kualitas Sungai Batang Hari yang disebabkan karena adanya limbah kegiatan PETI skala besar dan kegiatan domestik. Selanjutnya adalah kecenderungan penurunan kualitas air Danau Maninjau (danau strategis dan tujuan wisata) yang ditandai dengan kematian ikan pada waktu-waktu tertentu. Hal ini disebabkan banyaknya jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) yang sudah melebihi daya tampung dan daya dukung Danau Maninjau.

2. Terkait masalah limbah dan persampahan. Limbah padat (sampah) yaitu meningkatnya jumlah timbulan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan serta sarana prasarana pengolahan sampah. Pada umumnya layanan tidak sampai menjangkau pemukiman yang berada pada sempadan sungai, danau dan wilayah pesisir walaupun pemukiman tersebut cukup padat. Di sisi lain sampah juga merupakan sumber pencemaran utama sungai-sungai di perkotaan dan sumber dari emisi gas rumah kaca (GRK).

Isu lainnya adalah belum terkelolanya limbah B3 dan limbah cair rumah sakit serta hotel. Belum terkelolanya secara baik limbah cair dan limbah B3 sebagian rumah sakit pemerintah dan hotel memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap pencemaran di Sumatera Barat, sehingga isu limbah cair dan limbah B3 rumah sakit dan hotel patut menjadi isu prioritas.

3. Terkait kebencanaan, baik bencana alam (gempa bumi baik tektonik maupun vulkanik) maupun bencana lingkungan (banjir, longsor, dan kebakaran hutan). Isu kebencanaan yang menjadi prioritas di Sumatera Barat yaitu banjir, longsor dan kebakaran hutan. Untuk bencana banjir, walaupun tidak separah tahun 2012, kejadian banjir pada lokasi tertentu menimbulkan kerugian yang cukup besar. Sedangkan bencana longsor terjadi dengan

intensitas kecil. Adapun bencana kebakaran hutan dan lahan terluas terjadi di Kabupaten Pasaman Barat yakni seluas 70 ha, selanjutnya Kabupaten Agam dan Dharmasraya masing-masing seluas 40 ha.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Hasil rancangan awal RKPD belum memenuhi hasil analisis kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pembangunan lingkungan hidup di Tahun 2019. Ini disebabkan karena adanya pembentukan UPTD Persampahan dan UPTD Laboratorium Lingkungan di lingkup Dinas LH Provinsi Sumatera Barat. Untuk mengakomodir semua itu, harus adanya penyesuaian terhadap Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada table 2.5

Tabel 2.5  
Review terhadap rancangan awal rkpd tahun 2019  
Provinsi Sumatera Barat

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10.281.000.000					36.532.000.000	
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Terselenggaranya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran</b>		1.554.000.000	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Terselenggaranya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran</b>		1.696.000.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang	Tersedianya materai, paket pengiriman surat dan BBM yang disediakan	12 bulan	36.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang	Tersedianya materai, paket pengiriman surat dan BBM yang disediakan	12 bulan	36.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang	Pembayaran rekening listrik, telepon, air, faximile, internet	12 bulan	293.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang	Pembayaran rekening listrik, telepon, air, faximile, internet	12 bulan	338.000.000	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Padang	Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor	13 bulan	200.000.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Padang	Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor	13 bulan	200.000.000	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Padang	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	50.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	60.000.000	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Padang	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	50.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Padang	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	50.000.000	
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Padang	Tersedianya komponen listrik/penerangan	komponen	11.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Padang	Tersedianya komponen listrik/penerangan	komponen	12.000.000	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	Padang	Jumlah Media/surat kabar harian yang disediakan	12 bulan	30.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	Padang	Jumlah Media/surat kabar harian yang disediakan	12 bulan	30.000.000	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Padang	Tersedianya makan dan minum kantor	12 bulan	54.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Padang	Tersedianya makan dan minum kantor	12 bulan	40.000.000	
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah dan keluar daerah	Padang	Jumlah pelaksanaan konsultasi dan koordinasi ke dalam dan luar daerah	37 kali	350.000.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah dan keluar daerah	Padang	Jumlah pelaksanaan konsultasi dan koordinasi ke dalam dan luar daerah	37 kali	420.000.000	
10	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Padang	Terlaksananya pembayaran jasa sopir kantor	13 bulan	200.000.000	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Padang	Terlaksananya pembayaran jasa sopir kantor	13 bulan	220.000.000	
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Padang	Terlaksananya pembayaran jasa pengaman kantor	13 bulan	250.000.000	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Padang	Terlaksananya pembayaran jasa pengaman kantor	13 bulan	260.000.000	
12	Penyediaan Jasa Informasi Dokumenter dan Publikasi	Padang	Terlaksananya penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi	12 bulan	30.000.000	Penyediaan Jasa Informasi Dokumenter dan Publikasi	Padang	Terlaksananya penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi	12 bulan	30.000.000	

II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya sarana dan prasarana		2.604.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya sarana dan prasarana		2.788.000.000
1	Pembangunan Gedung Kantor	Padang	Jumlah paket pembangunan gedung kantor	paket	1.046.075.000	Pembangunan Gedung Kantor	Padang	Jumlah paket pembangunan gedung kantor	paket	1.315.000.000
2	Pengadaan Meubeleu	Padang	Jumlah unit meubeleu yang diadakan	jenis	220.000.000	Pengadaan Meubeleu	Padang	Jumlah unit meubeleu yang diadakan	jenis	200.000.000
3	Pengadaan kendaraan Dinas	Padang	Jumlah unit Kendaraan yang diadakan roda empat roda dua	1 unit	300.000.000	Pengadaan kendaraan Dinas	Padang	Jumlah unit Kendaraan yang diadakan roda empat roda dua	1 unit	19.000.000
4	Pengadaan Komputer dan jaringan komputerisasi	Padang	Tersedianya PC, laptop/notebook, printer, scanner	jenis	176.000.000	Pengadaan Komputer dan jaringan komputerisasi	Padang	Tersedianya PC, laptop/notebook, printer, scanner	jenis	176.000.000
5	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Padang	Tersedianya alat-alat studio, komunikasi dan informasi	unit	97.000.000	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Padang	Tersedianya alat-alat studio, komunikasi dan informasi	unit	400.000.000
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Padang	Terlaksananya paket pemeliharaan gedung kantor	paket	168.465.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Padang	Terlaksananya paket pemeliharaan gedung kantor	paket	150.000.000
7	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Padang	Tersedianya suku cadang, pajak STNK dan asuransi kendaraan	unit	129.460.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Padang	Tersedianya suku cadang, pajak STNK dan asuransi kendaraan	unit	108.000.000
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	Terlaksananya pemeliharaan AC	unit	100.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	Terlaksananya pemeliharaan AC	unit	42.000.000
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Padang	Terlaksananya pemeliharaan komputer dan jaringan komputerisasi	jenis	30.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Padang	Terlaksananya pemeliharaan komputer dan jaringan komputerisasi	jenis	31.000.000
10	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan jaringan		Terlaksananya pemeliharaan instalasi dan jaringan listrik, telp dan air	bulan	25.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan jaringan		Terlaksananya pemeliharaan instalasi dan jaringan listrik, telp dan air	bulan	31.000.000
11	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD		Pembayaran Honor pengawasan dan pengendalian asset SKPD	bulan	77.000.000	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD		Pembayaran Honor pengawasan dan pengendalian asset SKPD	bulan	77.000.000
12	Penataan dan Pengelolaan Arsip		Jumlah Bahan kelengkapan penetapan arsip Bapedalda	meter lari	15.000.000	Penataan dan Pengelolaan Arsip		Jumlah Bahan kelengkapan penetapan arsip Bapedalda	meter lari	19.000.000
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	11 jenis	220.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	11 jenis	220.000.000
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Terselenggaranya peningkatan disiplin aparatur		600.000.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Terselenggaranya peningkatan disiplin aparatur		55.000.000
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Padang	Tersedianya pakaian dinas pegawai	67 pegawai	600.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Padang	Tersedianya pakaian dinas pegawai	67 pegawai	55.000.000
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		121.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		104.000.000

1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Padang	Jumlah keikutsertaan aparatur dalam mengikuti bimtek implementasi peraturan Perundang-undangan	14 kali	121.000.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Padang	Jumlah keikutsertaan aparatur dalam mengikuti bimtek implementasi peraturan Perundang-undangan	14 kali	104.000.000
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian</b>		<b>Meningkatnya penyelenggaraan penatausahaan keuangan</b>		<b>242.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian</b>		<b>Meningkatnya penyelenggaraan penatausahaan keuangan</b>		<b>267.000.000</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Padang	Tersedianya LAKIP, LKPJ dan LPPD	12 bulan	30.000.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Padang	Tersedianya LAKIP, LKPJ dan LPPD	12 bulan	60.000.000
2	Penatausahaan keuangan SKPD	Padang	Tertibnya administrasi keuangan SKPD	12 bulan	182.000.000	Penatausahaan keuangan SKPD	Padang	Tertibnya administrasi keuangan SKPD	12 bulan	182.000.000
3	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Padang	Tersedianya pra RKA, RKA, DPA, DPPA dan ekspose Ka. Badan	12 bulan	30.000.000	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Padang	Tersedianya pra RKA, RKA, DPA, DPPA dan ekspose Ka. Badan	12 bulan	25.000.000
<b>IV</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>		<b>Terkendalinya sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup</b>		<b>2.470.000.000</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>		<b>Terkendalinya sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup</b>		<b>4.245.000.000</b>
1	Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Media Lingkungan Hidup	Padang	Jumlah percontohan pemulihan pencemaran	1 klaster Dokumen	200.000.000	Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Media Lingkungan Hidup	Padang	Jumlah percontohan pemulihan pencemaran	1 klaster Dokumen	280.000.000
2	Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi	Padang	Jumlah sungai skala provinsi	10 Sungai 5 danau	350.000.000 125.000.000	Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi	Padang	Jumlah sungai skala provinsi	10 Sungai 5 danau	350.000.000 110.000.000
3	Pemantauan Kualitas Udara Ambien	Padang	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemantau kualitas udara ambien	19 Kab/kota	175.000.000	Pemantauan Kualitas Udara Ambien	Padang	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemantau kualitas udara ambien	19 Kab/kota	150.000.000
4	Pemantauan pesisir dan laut	Padang	jumlah kabupaten/kota kawasan pesisir pantai dan muara sungai yang dipantau kualitas air lautnya	6 kab/kota	100.000.000	Pemantauan pesisir dan laut	Padang	jumlah kabupaten/kota kawasan pesisir pantai dan muara sungai yang dipantau kualitas air lautnya	6 kab/kota	75.000.000
5	Penetapan dan evaluasi baku mutu lingkungan dan baku mutu limbah cair usaha dan/atau kegiatan	Padang	jumlah kajian baku mutu/peruntukan, status danau	1 dokumen (danau)	200.000.000	Penetapan dan evaluasi baku mutu lingkungan dan baku mutu limbah cair usaha dan/atau kegiatan	Padang	jumlah kajian baku mutu/peruntukan, status danau	1 dokumen (danau)	250.000.000
6	Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan daerah (PROPERDA)	Padang	Jumlah objek kegiatan yang dinilai kinerja pengelolaan lingkungan hidupnya	23 kegiatan	250.000.000	Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan daerah (PROPERDA)	Padang	Jumlah objek kegiatan yang dinilai kinerja pengelolaan lingkungan hidupnya	23 kegiatan	200.000.000

7	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3	Padang	Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pemantauan dalam pengelolaan LB3 (penghasil, pemanfaat, pengumpul, pengangkut)	58 objek	300.000.000	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3	Padang	Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pemantauan dalam pengelolaan LB3 (penghasil, pemanfaat, pengumpul, pengangkut)	58 objek	320.000.000
8	Pilot proyek pengelolaan LB3	Padang	Jumlah dokumen FS pengelolaan LB3 yang disusun	1 dokumen	0	Pilot proyek pengelolaan LB3	Padang	Jumlah dokumen FS pengelolaan LB3 yang disusun	1 dokumen	500.000.000
9	Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura)	Padang	Jumlah kab /kota yang dibina dan dinilai	14 Kab/kota	250.000.000	Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura)	Padang	Jumlah kab /kota yang dibina dan dinilai	14 Kab/kota	310.000.000
10	Penanggulangan dan pemulihan kerusakan LH	Padang	Jumlah dokumen kajian pemetaan sosial yang disusun	1 dokumen	-	Penanggulangan dan pemulihan kerusakan LH	Padang	Jumlah dokumen kajian pemetaan sosial yang disusun	1 dokumen	300.000.000
			Tersusunnya dokumen Studi Kelayakan dan DED	1 dokumen	-			Tersusunnya dokumen Studi Kelayakan dan DED	1 dokumen	500.000.000
11	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan	Padang	Jumlah objek yang dilakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan	30 kegiatan/usaha	170.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan	Padang	Jumlah objek yang dilakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan	30 kegiatan/usaha	250.000.000
12	Pengawasan dan pengendalian sumber kerusakan LH	Padang	Jumlah sumber kerusakan lingkungan yang diidentifikasi kerusakannya dan ditindaklanjuti dengan upaya upaya pencegahan	20 objek	200.000.000	Pengawasan dan pengendalian sumber kerusakan LH	Padang	Jumlah sumber kerusakan lingkungan yang diidentifikasi kerusakannya dan ditindaklanjuti dengan upaya upaya pencegahan	20 objek	150.000.000
13	Pemantauan kualitas lahan dan biota Laut	Padang	Jumlah objek biomassa yang dipantau	10 objek	-	Pemantauan kualitas lahan dan biota Laut	Padang	Jumlah objek biomassa yang dipantau	10 objek	100.000.000
			Jumlah objek gambut yang dipantau	6 objek				Jumlah objek gambut yang dipantau	6 objek	75.000.000
			Jumlah objek mangrove yang dipantau	8 objek				Jumlah objek mangrove yang dipantau	8 objek	100.000.000
			Jumlah objek terumbu karang yang dipantau	6 objek				Jumlah objek terumbu karang yang dipantau	6 objek	75.000.000
14	Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Program Kampung Iklim)	Padang	Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	19 Kab/Kota	150.000.000	Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Program Kampung Iklim)	Padang	Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	19 Kab/Kota	150.000.000

I	Program Pentaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan		Persentase ketaatan pemilik usaha dan/atau kegiatan terhadap hukum lingkungan		500.000.000	Program Pentaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan		Persentase ketaatan pemilik usaha dan/atau kegiatan terhadap hukum lingkungan		1.550.000.000
1	Penyusunan peraturan perundang undangan bidang lingkungan hidup	Padang	Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang disusun	4 Perda / Pergub / Keppub	-	Penyusunan peraturan perundang undangan bidang lingkungan hidup	Padang	Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang disusun	4 Perda / Pergub / Keppub	500.000.000
2	Peningkatan kapasitas aparatur Dinas LH Prov dan kab/kota dalam penegakan hukum lingkungan	Padang	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat PPLH / PPNS	20 orang	-	Peningkatan kapasitas aparatur Dinas LH Prov dan kab/kota dalam penegakan hukum lingkungan	Padang	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat PPLH / PPNS	20 orang	300.000.000
3	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Padang	Jumlah peraturan yang disosialisasikan	2 peraturan	-	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Padang	Jumlah peraturan yang disosialisasikan	2 peraturan	150.000.000
4	Pembinaan hukum dan perizinan lingkungan	Padang	Jumlah instansi lingkungan hidup dan pemilik usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan perizinan	8 kab/kota	250.000.000	Pembinaan hukum dan perizinan lingkungan	Padang	Jumlah instansi lingkungan hidup dan pemilik usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan perizinan	8 kab/kota	200.000.000
			jumlah pemilik usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan perizinan	8 objek				jumlah pemilik usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan perizinan	8 objek	
5	Penaatan hukum lingkungan	Padang	Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan dan kegiatan dan/atau usaha yang dijadikan objek penegakan hukum	7 kasus objek	250.000.000	Penaatan hukum lingkungan	Padang	Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan dan kegiatan dan/atau usaha yang dijadikan objek penegakan hukum	7 kasus objek	200.000.000
			Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat difasilitasi penyelesaiannya	7 kasus				Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat difasilitasi penyelesaiannya	7 kasus	200.000.000
	<b>Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan</b>		<b>Persentase penurunan volume sampah melalui implementasi 3R</b>	<b>%</b>	<b>555.000.000</b>	<b>Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan</b>		<b>Persentase penurunan volume sampah melalui implementasi 3R</b>	<b>%</b>	<b>1.250.000.000</b>
1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Padang	Jumlah kegiatan / kelompok masyarakat yang mengaplikasikan 3R sampah	2 kelompok	-	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Padang	Jumlah kegiatan / kelompok masyarakat yang mengaplikasikan 3R sampah	2 kelompok	200.000.000
2	Pembangunan pilot proyek 3R di permukiman	Padang	Jumlah pilot project pengelolaan 3R yang dibangun	1 pilot project	-	Pembangunan pilot proyek 3R di permukiman	Padang	Jumlah pilot project pengelolaan 3R yang dibangun	1 pilot project	525.000.000

3	Pembinaan pengelolaan sampah kab/kota	Padang	Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam pengelolaan persampahan	19 kab/kota	160.000.000	Pembinaan pengelolaan sampah kab/kota	Padang	Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam pengelolaan persampahan	19 kab/kota	100.000.000
4	Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih	Padang	Jumlah kecamatan/kelurahan yang dibina dan dinilai	26 kec/kel	300.000.000	Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih	Padang	Jumlah kecamatan/kelurahan yang dibina dan dinilai	26 kec/kel	325.000.000
5	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Padang	Jumlah kab/kota yang dimonitoring/dievaluasi pelaksanaan PPSP	19 kab/kota	95.000.000	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Padang	Jumlah kab/kota yang dimonitoring/dievaluasi pelaksanaan PPSP	19 kab/kota	100.000.000
	<b>Program Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>		<b>1) Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbar 2) Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan 3) Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria</b>		<b>815.000.000</b>	<b>Program Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>		<b>1) Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbar 2) Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan 3) Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria</b>		<b>2.155.000.000</b>
1	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah peserta Rakor PLH	67 Orang	130.000.000	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah peserta Rakor PLH	67 Orang	100.000.000
			Jumlah Kab/Kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi	19 Kab/Kota				Jumlah Kab/Kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi	19 Kab/Kota	
2	Penyusunan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut	Padang	Jumlah Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut	1 dokumen	0	Penyusunan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut	Padang	Jumlah Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut	1 dokumen	350.000.000
3	Bimtek penyusunan RPPLH berbasis dokumen daya dukung daya tampung lingkungan Kab/Kota	Padang	Jumlah peserta bimbingan teknis RPPLH berbasis dokumen daya dukung daya tampung lingkungan	50 orang	0	Bimtek penyusunan RPPLH berbasis dokumen daya dukung daya tampung lingkungan Kab/Kota	Padang	Jumlah peserta bimbingan teknis RPPLH berbasis dokumen daya dukung daya tampung lingkungan	50 orang	200.000.000
4	Pembinaan dan evaluasi penyusunan RPPLH berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan	Padang	Jumlah Kab/Kota yang dibina dan dievaluasi penyusunan RPPLH berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan	19 kab/kota	175.000.000	Pembinaan dan evaluasi penyusunan RPPLH berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan	Padang	Jumlah Kab/Kota yang dibina dan dievaluasi penyusunan RPPLH berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan	19 kab/kota	175.000.000

5	Valuasi ekonomi lingkungan melalui Insentif, disinsentif dan pendanaan lingkungan	Padang	Jumlah instrumen valuasi ekonomi lingkungan (insentif, disinsentif dan pendanaan lingkungan) yang disusun	1 dokumen	-	Valuasi ekonomi lingkungan melalui Insentif, disinsentif dan pendanaan lingkungan	Padang	Jumlah instrumen valuasi ekonomi lingkungan (insentif, disinsentif dan pendanaan lingkungan) yang disusun	1 dokumen	300.000.000
6	Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penatalaksanaan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup	Padang	Jumlah kab/kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian dokumen Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL nya	19 kab/kota	150.000.000	Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penatalaksanaan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup	Padang	Jumlah kab/kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian dokumen Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL nya	19 kab/kota	200.000.000
			Jumlah kab/kota yang dibina/diverifikasi terkait pengajuan lisensi Komisi Penilai Amdalnya	6 kab/kota				75.000.000		
			Jumlah peserta sosialisasi/bimtek terkait dokumen lingkungan	50 orang				75.000.000		
7	Pembinaan KLHS Terhadap Dokumen Perencanaan	Padang	Jumlah kab/kota yang dibina dalam pelaksanaan KLHS terhadap dokumen perencanaan	8 Kab/kota	130.000.000	Pembinaan KLHS Terhadap Dokumen Perencanaan	Padang	Jumlah kab/kota yang dibina dalam pelaksanaan KLHS terhadap dokumen perencanaan	8 Kab/kota	130.000.000
			Jumlah peserta sosialisasi/bimtek terkait pelaksanaan KLHS	50 orang				75.000.000		
8	Pemetaan Ekosistem Pemeliharaan Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati	Padang	Jumlah Ekosistem yang di petakan potensi kawasan.	1 ekosistem	100.000.000	Pemetaan Ekosistem Pemeliharaan Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati	Padang	Jumlah Ekosistem yang di petakan potensi kawasan.	1 ekosistem	220.000.000
9	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola kawasan pemeliharaan lingkungan	Padang	Jumlah petugas yang mengikuti pelatihan pemeliharaan kawasan	20 orang	-	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola kawasan pemeliharaan lingkungan	Padang	Jumlah petugas yang mengikuti pelatihan pemeliharaan kawasan	20 orang	100.000.000
			Jumlah kelompok/lembaga pemeliharaan yang dibina (pemeliharaan danau, das, RTH dll)	3 kelompok				3 kelompok		
10	Fasilitasi dan model penetapan kawasan pemeliharaan	Padang	jumlah kawasan pemeliharaan yang kembangkan	3 kawasan		Fasilitasi dan model penetapan kawasan pemeliharaan	Padang	jumlah kawasan pemeliharaan yang kembangkan	3 kawasan	80.000.000
11	Perlindungan atmosfer dari perusak ozon (BPO) dan emisi gas rumah kaca (GRK)	Padang	Jumlah Kab/kota yang diidentifikasi pemakaian bahan perusak ozon dan emisi gas rumah kaca	19 kab/kota	130.000.000	Perlindungan atmosfer dari perusak ozon (BPO) dan emisi gas rumah kaca (GRK)	Padang	Jumlah Kab/kota yang diidentifikasi pemakaian bahan perusak ozon dan emisi gas rumah kaca	19 kab/kota	150.000.000
			Jumlah peserta yang mengikuti edukasi BPO	100 orang				100 orang		

	Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		Persentase peningkatan jumlah masyarakat/kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan		820.000.000	Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		Persentase peningkatan jumlah masyarakat/kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan		1.755.000.000
1	Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru)	Padang	Jumlah calon yang dibina untuk diusulkan sebagai calon penerima kalpataru	8 orang / kelompok	100.000.000	Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru)	Padang	Jumlah calon yang dibina untuk diusulkan sebagai calon penerima kalpataru	8 orang / kelompok	100.000.000
2	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)	Padang	Jumlah buku DIKPLHD Prov. Sumbar yang dicetak	40 buku	270.000.000	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)	Padang	Jumlah buku DIKPLHD Prov. Sumbar yang dicetak	40 buku	270.000.000
			Jumlah Kab/Kota yang ditetapkan sebagai Penyusun Buku DIKPLHD terbaik Tingkat Propinsi Sumatera Barat	5 kab/kota				Jumlah Kab/Kota yang ditetapkan sebagai Penyusun Buku DIKPLHD terbaik Tingkat Propinsi Sumatera Barat	5 kab/kota	
3	GEPULING (Gerakan Penyuluhan Lingkungan)	Padang	Jumlah penyuluh multi sektor yang ditingkatkan wawasan lingkungannya dan diberdayakan dalam penyebarluasan informasi lingkungan hidup	50 orang	0	GEPULING (Gerakan Penyuluhan Lingkungan)	Padang	Jumlah penyuluh multi sektor yang ditingkatkan wawasan lingkungannya dan diberdayakan dalam penyebarluasan informasi lingkungan hidup	50 orang	75.000.000
4	Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dasar dan menengah dalam pelestarian lingkungan hidup	Padang	Jumlah sekolah yang dibina dan dinilai dalam program Adiwiyata	100 sekolah	350.000.000	Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dasar dan menengah dalam pelestarian lingkungan hidup	Padang	Jumlah sekolah yang dibina dan dinilai dalam program Adiwiyata	100 sekolah	1.125.000.000
5	Koordinasi Pengelolaan Inovasi Lingkungan	Padang	Jumlah inovasi lingkungan yang dikoordinasikan dan ditindaklanjuti	10 inovasi	0	Koordinasi Pengelolaan Inovasi Lingkungan	Padang	Jumlah inovasi lingkungan yang dikoordinasikan dan ditindaklanjuti	10 inovasi	35.000.000
6	Peningkatan edukasi dan kampanye masyarakat di bidang lingkungan	Padang	jumlah rangkaian acara edukasi dan kampanye lingkungan hidup	2 iven	100.000.000	Peningkatan edukasi dan kampanye masyarakat di bidang lingkungan	Padang	jumlah rangkaian acara edukasi dan kampanye lingkungan hidup	2 iven	150.000.000
	<b>Program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional</b>		<b>Meningkatkan pengelolaan TPA Sampah Regional</b>		<b>0</b>	<b>Program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional</b>		<b>Meningkatkan pengelolaan TPA Sampah Regional</b>		<b>6.700.000.000</b>

1	Pemantauan kualitas lingkungan kawasan TPA Sampah Regional	Payakumbuh dan Kota Solok	Jumlah laporan kawasan lingkungan TPA Sampah Regional yang dipantau	4 Laporan	0	Pemantauan kualitas lingkungan kawasan TPA Sampah Regional	Payakumbuh dan Kota Solok	Jumlah laporan kawasan lingkungan TPA Sampah Regional yang dipantau	4 Laporan	200.000.000
2	Peningkatan pembangunan Infrastruktur TPA Regional	Payakumbuh dan Kota Solok	Tersedianya infrastruktur di TPA Sampah Regional	2 lokasi	0	Peningkatan pembangunan Infrastruktur TPA Regional	Payakumbuh dan Kota Solok	Tersedianya infrastruktur di TPA Sampah Regional	2 lokasi	2.000.000.000
3	Pengendalian dan operasional UPTD TPA Sampah Regional	Payakumbuh dan Kota Solok	Terlaksananya operasional TPA	2 TPA	0	Pengendalian dan operasional UPTD TPA Sampah Regional	Payakumbuh dan Kota Solok	Terlaksananya operasional TPA	2 TPA	4.500.000.000
	<b>Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan</b>				<b>0</b>	<b>Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan</b>				<b>13.237.000.000</b>
1	Pengadaan peralatan laboratorium lingkungan		Jumlah peralatan laboratorium yang disediakan	1 paket	0	Pengadaan peralatan laboratorium lingkungan		Jumlah peralatan laboratorium yang disediakan	1 paket	13.237.000.000
	<b>Program pengembangan sistem dan pengelolaan laboratorium lingkungan</b>				<b>0</b>	<b>Program pengembangan sistem dan pengelolaan laboratorium lingkungan</b>				<b>480.000.000</b>
1	Pengujian laboratorium kualitas lingkungan		Jumlah laporan pengujian kualitas lingkungan	75 laporan	0	Pengujian laboratorium kualitas lingkungan		Jumlah laporan pengujian kualitas lingkungan	75 laporan	200.000.000
2	Persiapan akreditasi laboratorium lingkungan Prov.Sumbar		Presentase peningkatan pencapaian akreditasi laboratorium	10%	0	Persiapan akreditasi laboratorium lingkungan Prov.Sumbar		Presentase peningkatan pencapaian akreditasi laboratorium	10%	75.000.000
3	Pembinaan Laboratorium Lingkungan di Kab/Kota		Jumlah laboratorium lingkungan Kab/Kota yang dibina	10 laboratorium	0	Pembinaan Laboratorium Lingkungan di Kab/Kota		Jumlah laboratorium lingkungan Kab/Kota yang dibina	10 laboratorium	100.000.000
4	Pengendalian dan operasional UPTD Laboratorium		Terlaksananya operasional laboratorium lingkungan Prov. Sumbar	1 unit	0	Pengendalian dan operasional UPTD Laboratorium		Terlaksananya operasional laboratorium lingkungan Prov. Sumbar	1 unit	105.000.000
5	Peningkatan kualitas personil laboratorium Prov. Sumbar		Jumlah laboratorium yang kompeten	orang	0	Peningkatan kualitas personil laboratorium Prov. Sumbar		Jumlah laboratorium yang kompeten	orang	250.000.000

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 secara umum telah mengakomodir program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kab/Kota, hal ini dimungkinkan karena isu lingkungan hidup di setiap wilayah dapat dikatakan serupa. Usulan program dan kegiatan urusan lingkungan hidup diperoleh melalui pengumpulan data dan informasi perencanaan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota, yang selanjutnya akan direkapitulasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat sebagai bahan yang akan dibahas pada Rapat Koordinasi Program/Kegiatan tingkat Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2019.

## Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang relevan dengan kondisi lima tahun kedepan yaitu :

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis;
6. Pengembangan pariwisata, industry, perdagangan, koperasi, UMKM dan Peningkatan investasi;
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan;
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal;
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur;
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Maka dari 10 prioritas di atas, yang berkaitan erat dengan Lingkungan Hidup adalah prioritas nomor 10 yaitu Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana dengan program strategis sebagai berikut :

- a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
- b. Program Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- c. Program Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
- d. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
- e. Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- f. Program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.
- g. Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan.
- h. Program pengembangan sistem dan pengelolaan laboratorium lingkungan.
- i. Program Peningkatan Kapasitas SDM.

Selain melalui 9 (sembilan) program strategis di atas, dukungan OPD Lingkungan Hidup dalam pencapaian sasaran tersebut di atas juga melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta program pendukung lainnya berupa Program Pelayanan administrasi perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Secara teknis selain dukungan bagi pencapaian sasaran pokok arah kebijakan pembangunan pada RPJM ke 4 dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan sektor dan urusan lingkungan hidup Tahun 2019 oleh Dinas Lingkungan Hidup bertujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya lingkungan yang tertata.
2. Terwujudnya kualitas media lingkungan hidup yang layak.
3. Terwujudnya pemeliharaan / konservasi sumber daya alam.
4. Terwujudnya peningkatan kapasitas lingkungan dan peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan tujuan tersebut selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menjabarkannya dalam 5 (lima) sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat 2017-2021 serta RPJMD Sumatera Barat 2016-2021. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis selama periode 2017-2021 seperti pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1  
Tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran tahun 2019

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja Sasaran pada tahun 2019
1.	Terwujudnya tata lingkungan	Terwujudnya penataan lingkungan hidup	1. Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbar	63%
			2. Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan	75%
2.	Terwujudnya kualitas media lingkungan hidup yang layak	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1. Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan	10%
			2. Indeks Pencemaran Air (IPA)	5 < IPA < 10
			3. Indeks Pencemaran Udara (IPU)	IPU < 11
3.	Terwujudnya pemeliharaan / konservasi sumber daya alam	Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi lingkungan hidup	Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria	15%
4.	Terwujudnya peningkatan kapasitas lingkungan dan peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup	1. Meningkatnya kapasitas dan peranserta <i>stakeholders</i>	Persentase peningkatan jumlah masyarakat/kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	18%
		2. Meningkatnya tata kelola organisasi	1. Nilai evaluasi AKIP OPD	B
			2. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program / kegiatan	96%

### 3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan strategi yang telah disusun untuk Rencana Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, perlu dijabarkan

lebih lanjut dalam bentuk rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja dari masing-masing program.

Pada Tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat direncanakan menjalankan 14 Program dan 80 kegiatan yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Uraian rencana Program dan Kegiatan beserta indikatornya pada Tahun 2019 dapat terlihat pada tabel 3.3 (terlampir).

Tabel 3.3  
Rencana Program Dan Kegiatan Skpd Tahun 2019 Dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WAJIB								
	Lingkungan Hidup				11.484.000.000				26.073.000.000
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terselenggaranya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran</b>			<b>1.680.797.877</b>				<b>1.857.500.000</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai, paket pengiriman surat dan BBM yang disediakan	Padang	12 bulan	55.800.000			12 bulan	40.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik, telepon, air, faximile, internet	Padang	12 bulan	312.000.000			12 bulan	372.000.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Jumlah pembayaran honorarium jasa kebersihan, tenaga pengaman dan sopir kantor	Padang	13 bulan	580.000.000			13 bulan	680.000.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Padang	12 bulan	60.000.000			12 bulan	65.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Padang	12 bulan	50.000.000			12 bulan	60.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan	Padang	komponen	11.997.877			komponen	15.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	Jumlah Media/surat kabar harian yang disediakan	Padang	12 bulan	30.000.000			12 bulan	32.000.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum kantor	Padang	12 bulan	40.000.000			12 bulan	60.000.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah dan keluar daerah	Jumlah pelaksanaan konsultasi dan koordinasi ke dalam dan luar daerah	Padang	37 kali	450.000.000			37 kali	430.000.000
	Penyediaan Jasa Informasi Dokumenter dan Publikasi	Terlaksananya penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi	Padang	12 bulan	30.000.000			12 bulan	35.000.000
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan yang dialokasikan premi asuransinya	Padang	7 unit kendaraan roda empat	42.000.000			7 unit kendaraan roda empat	47.500.000
	Penataan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah Bahan kelengkapan penetapan arsip Bapedalda		10 meter lari	19.000.000			meter lari	21.000.000
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana</b>			<b>1.661.980.000</b>				<b>1.781.500.000</b>
	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah paket pembangunan gedung kantor	Padang	1 paket	315.000.000			paket	-
	Pengadaan Meubeleur	Jumlah unit meubeleur yang diadakan	Padang	4 jenis	200.000.000			jenis	250.000.000
	Pengadaan kendaraan Dinas	Jumlah unit Kendaraan yang diadakan roda empat roda dua	Padang	1 unit kendaraan roda dua	19.000.000			unit	500.000.000
	Pengadaan Komputer dan jaringan komputerisasi	Tersedianya PC, laptop/notebook, printer, scanner	Padang	5 jenis	214.980.000			jenis	167.000.000
	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Tersedianya alat-alat studio, komunikasi dan informasi	Padang	8 unit	316.000.000			unit	225.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya paket pemeliharaan gedung kantor	Padang	7 paket	150.000.000			paket	200.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya suku cadang, pajak STNK dan asuransi kendaraan	Padang	7 unit kendaraan roda empat	73.700.000		unit	71.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan AC	Padang	20 unit	21.700.000		unit	50.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terlaksananya pemeliharaan komputer dan jaringan komputerisasi	Padang	jenis	26.600.000		jenis	34.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan jaringan	Terlaksananya pemeliharaan instalasi dan jaringan listrik, telp dan air		12 bulan	31.000.000		bulan	34.000.000
Penngadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Padang	11 jenis	294.000.000		11 jenis	250.000.000
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Terselenggaranya peningkatan disiplin aparatur</b>			<b>61.500.000</b>			<b>60.000.000</b>
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas pegawai	Padang	82 pegawai	61.500.000		67 pegawai	60.000.000
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur</b>			<b>134.984.000</b>			<b>128.000.000</b>
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah keikutsertaan aparatur dalam mengikuti bimtek implementasi peraturan Perundang-undangan	Padang	14 kali	134.984.000		14 kali	128.000.000
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian</b>	<b>Meningkatnya penyelenggaraan penatausahaan keuangan</b>			<b>399.610.456</b>			<b>381.000.000</b>
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya LAKIP, LKPJ dan LPPD	Padang	12 bulan	60.000.000		12 bulan	70.000.000
Penata usahaanaan keuangan SKPD	Tertibnya administrasi keuangan SKPD	Padang	12 bulan	236.000.000		12 bulan	200.000.000
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersedianya pra RKA, RKA, DPA, DPPA dan ekspose Ka. Badan	Padang	12 bulan	25.000.000		12 bulan	27.000.000
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Pembayaran Honor pengawasan dan pengendalian asset SKPD		12 bulan	78.610.456		bulan	84.000.000
<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Terkendalnya sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup</b>			<b>2.855.925.467</b>			<b>7.645.000.000</b>
Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Media Lingkungan Hidup	Jumlah percontohan pemulihan pencemaran	Padang	1 klaster	280.000.000		1 klaster	300.000.000
			-	-		1 Dokumen	-
Pengembangan teknologi pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Penerapan teknologi tepat guna pengolahan limbah industri kecil yang dihasilkan		-	101.100		1 Dokumen	100.000.000
Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi	Jumlah sungai skala provinsi	Padang	10 Sungai	200.000.000		11 Sungai	400.000.000
			5 danau	100.000.000		5 danau	100.000.000
Pemantauan Kualitas Udara Ambien	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemantau kualitas udara ambien	Padang	19 Kab/kota	120.000.000		19 Kab/kota	175.000.000
Pemantauan pesisir dan laut	jumlah kabupaten/kota kawasan pesisir pantai dan muara sungai yang dipantau kualitas air lautnya	Padang	6 kab/kota	75.000.000		6 kab/kota	80.000.000
Penetapan dan evaluasi baku mutu lingkungan dan baku mutu limbah cair usaha dan/atau kegiatan	jumlah kajian baku mutu/peruntukan status danau		1 dokumen (danau)	225.000.000		-	0
	jumlah kajian baku mutu indutri/kegiatan skala kecil		-	-		1 dokumen (2 kegiatan)	250.000.000
Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan daerah (PROPERDA)	Jumlah objek kegiatan yang dinilai kinerja pengelolaan lingkungannya	Padang	23 kegiatan	200.000.000		25 kegiatan	250.000.000
Pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3	Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pemantauan dalam pengelolaan LB3 (penghasil, pemanfaat, pengumpul, pengangkut)	Padang	58 objek	220.000.000		63 objek	340.000.000
Pilot proyek pengelolaan LB3	Jumlah dokumen FS pengelolaan LB3 yang disusun	Padang	1 dokumen	101.100		-	-

	Jumlah dokumen lingkungan pengelolaan LB3 yang disusun		-	-		1 dokumen	500.000.000
Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura)	Jumlah kab /kota yang dibina dan dinilai	Padang	14 Kab/kota	235.000.000		14 Kab/kota	315.000.000
Penanggulangan dan pemulihan kerusakan LH	Jumlah dokumen kajian pemetaan sosial yang disusun	Padang	1 dokumen	298.650.000		-	-
	Tersusunnya dokumen Studi Kelayakan dan DED		1 dokumen	-		-	-
	Jumlah kerusakan lingkungan yang difasilitasi pemulihannya (lahan akses terbuka / biomassa / mangrove / terumbu karang)		-	-		2 lokasi	50.000.000
	Jumlah peserta workshop pemulihan kerusakan lingkungan		-	-		40 orang	50.000.000
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan	Jumlah objek yang dilakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan	Padang	30 kegiatan/usaha	200.000.000		40 kegiatan/usaha	300.000.000
Pengawasan dan pengendalian sumber kerusakan LH	Jumlah sumber kerusakan lingkungan yang diidentifikasi kerusakannya dan ditindaklanjuti dengan upaya upaya pencegahan	Padang	20 objek	150.000.000		25 objek	175.000.000
Pemantauan kualitas lahan dan biota Laut	Jumlah objek biomassa yang dipantau	Padang	10 objek	100.000.000		13 objek	125.000.000
	Jumlah objek gambut yang dipantau		6 objek	75.000.000		8 objek	100.000.000
	Jumlah objek mangrove yang dipantau		8 objek	-		10 objek	125.000.000
	Jumlah objek terumbu karang yang dipantau		6 objek	-		8 objek	100.000.000
Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Program Kampung Iklim)	Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim		19 Kab/Kota	150.000.000		19 Kab/Kota	170.000.000
Pengujian laboratorium kualitas lingkungan	Jumlah sampel pengujian kualitas lingkungan		75 sampel	20.000.000		100 sampel	335.000.000
Akreditasi laboratorium lingkungan Prov.Sumbar	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium yang disusun		2 dokumen	20.000.000		2 dokumen	100.000.000
Pembinaan Laboratorium Lingkungan di Kab/Kota	Jumlah laboratorium lingkungan Kab/Kota yang dibina		10 laboratorium	20.000.000		10 laboratorium	100.000.000
Pengendalian dan operasional UPTD Laboratorium	Terlaksananya operasional laboratorium lingkungan Prov. Sumbar		1 unit	10.000.000		1 unit	165.000.000
Peningkatan kualitas personil laboratorium Prov. Sumbar	Jumlah personil laboratorium yang ditingkatkan kompetensinya		10 orang	10.000.000		6 orang	125.000.000
Pengadaan peralatan, Supporting laboratorium dan bahan Kimia	Jumlah Pengadaan peralatan, Supporting laboratorium dan bahan Kimia yang disediakan		1 paket	147.073.267		1 paket	2.815.000.000
<b>Program Pnaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan</b>	<b>Persentase ketaatan pemilik usaha dan/atau kegiatan terhadap hukum lingkungan</b>			<b>924.101.100</b>			<b>1.455.000.000</b>
Penyusunan peraturan perundang undangan bidang lingkungan hidup	Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang disusun	Padang	4 Perda / Pergub / Keppub	304.000.000		3 Perda / Pergub / Keppub	250.000.000
Peningkatan kapasitas aparatur Dinas LH Prov dan kab/kota dalam penegakan hukum lingkungan	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat PPLH / PPNS	Padang	20 orang	101.100		20 orang	330.000.000
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peraturan yang disosialisasikan	Padang	2 peraturan	150.000.000		3 peraturan	200.000.000
Pembinaan hukum dan perizinan lingkungan	Jumlah instansi lingkungan hidup dan pemilik usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan perizinan	Padang	8 kab/kota	200.000.000		8 kab/kota	225.000.000
	jumlah pemilik usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan perizinan		8 objek			10 objek	

Penaatan hukum lingkungan	Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan dan kegiatan dan/atau usaha yang dijadikan objek penegakan hukum	Padang	7 kasus objek	270.000.000		8 kasus objek	225.000.000
	Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat difasilitasi penyelesaiannya		7 kasus			8 kasus	225.000.000
<b>Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan</b>	<b>Persentase penurunan volume sampah melalui implementasi 3R</b>		<b>%</b>	<b>680.101.100</b>		<b>%</b>	<b>1.290.000.000</b>
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Jumlah kegiatan / kelompok masyarakat yang mengaplikasikan 3R sampah	Padang	2 kelompok	200.000.000		2 kelompok	210.000.000
Pembangunan pilot projek 3R di permukiman	Jumlah pilot project pengelolaan 3R yang dibangun	Padang	1 pilot project	101.100		1 pilot project	550.000.000
Pembinaan pengelolaan sampah kab/kota	Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam pengelolaan persampahan	Padang	19 kab/kota	100.000.000		19 kab/kota	100.000.000
Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih	Jumlah kecamatan/kelurahan yang dibina dan dinilai	Padang	26 kec/ke	280.000.000		26 kec/ke	330.000.000
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Jumlah kab/kota yang dimonitoring/dievaluasi pelaksanaan PPSP	Padang	19 kab/kota	100.000.000		19 kab/kota	100.000.000
<b>Program Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	<b>1) Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbar 2) Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan 3) Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria</b>			<b>1.905.000.000</b>			<b>1.960.000.000</b>
Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah peserta Rakor PLH		67 Orang	100.000.000		67 Orang	120.000.000
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi		19 Kab/Kota			19 Kab/Kota	
Penyusunan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut	Jumlah Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut	Padang	1 dokumen	350.000.000		-	-
Bimtek penyusunan RPPLH berbasis dokumen daya dukung daya tampung lingkungan Kab/Kota	Jumlah peserta bimbingan teknis RPPLH berbasis dokumen daya dukung daya tampung lingkungan	Padang	50 orang	75.000.000		-	-
Pembinaan dan evaluasi penyusunan RPPLH berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan	Jumlah Kab/Kota yang dibina dan dievaluasi penyusunan RPPLH berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan	Padang	19 kab/kota	150.000.000		19 kab/kota	200.000.000
Valuasi ekonomi lingkungan melalui Insentif, disinsentif dan pendanaan lingkungan	Jumlah instrumen valuasi ekonomi lingkungan (insentif, disinsentif dan pendanaan lingkungan) yang disusun	Padang	1 dokumen	200.000.000		1 dokumen	400.000.000
	Jumlah instrumen valuasi ekonomi lingkungan diterapkan		-	-		1 instrumen	100.000.000
Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penatalaksanaan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup	Jumlah kab/kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian dokumen Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL nya	Padang	19 kab/kota	200.000.000		19 kab/kota	200.000.000
	Jumlah kab/kota yang dibina/diverifikasi terkait pengajuan lisensi Komisi Penilai Amdalnya		6 kab/kota	-		7 kab/kota	
	Jumlah peserta sosialisasi/bimtek terkait dokumen lingkungan		50 orang	75.000.000		50 orang	100.000.000
Pembinaan KLHS Terhadap Dokumen Perencanaan	Jumlah kab/kota yang dibina dalam pelaksanaan KLHS terhadap dokumen perencanaan	Padang	8 Kab/kota	130.000.000		10 Kab/kota	140.000.000
	Jumlah peserta sosialisasi/bimtek terkait		50 orang	75.000.000		50 orang	100.000.000

	pelaksanaan KLHS							
Pemetaan Ekosistem Pemeliharaan Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Ekosistem yang di petakan potensi kawasan.	Padang	1 ekosistem	220.000.000			1 ekosistem	240.000.000
Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola kawasan pemeliharaan lingkungan	Jumlah petugas yang mengikuti pelatihan pemeliharaan kawasan	Padang	20 orang	100.000.000			20 orang	120.000.000
	Jumlah kelompok/lembaga pemeliharaan yang dibina (pemeliharaan danau, das, RTH dll)		3 kelompok				4 kelompok	
Fasilitasi dan model penetapan kawasan pemeliharaan	jumlah kawasan pemeliharaan yang kembangkan	Padang	3 kawasan	80.000.000			4 kawasan	90.000.000
Perlindungan atmosfer dari perusak ozon (BPO) dan emisi gas rumah kaca (GRK)	Jumlah Kab/kota yang diidentifikasi pemakaian bahan perusak ozon dan emisi gas rumah kaca	Padang	19 kab/kota	150.000.000			19 kab/kota	150.000.000
	Jumlah peserta yang mengikuti edukasi BPO		100 orang				-	
<b>Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase peningkatan jumlah masyarakat/kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan</b>			<b>1.080.000.000</b>				<b>1.815.000.000</b>
Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru)	Jumlah calon yang dibina untuk diusulkan sebagai calon penerima kalpataru	Padang	8 orang / kelompok	100.000.000			10 orang / kelompok	100.000.000
Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)	Jumlah buku DIKPLHD Prov. Sumbar yang dicetak	Padang	40 buku	270.000.000			40 buku	275.000.000
	Jumlah Kab/Kota yang ditetapkan sebagai Penyusun Buku DIKPLHD terbaik Tingkat Propinsi Sumatera Barat		5 kab/kota				5 kab/kota	
GEPULING (Gerakan Penyuluhan Lingkungan)	Jumlah penyuluh multi sektor yang ditingkatkan wawasan lingkungannya dan diberdayakan dalam penyebarluasan informasi lingkungan hidup	Padang	50 orang	75.000.000			50 orang	80.000.000
Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dasar dan menengah dalam pelestarian lingkungan hidup	Jumlah sekolah yang dibina dan dinilai dalam program Adiwiyata	Padang	100 sekolah	450.000.000			100 sekolah	1.175.000.000
Koordinasi Pengelolaan Inovasi Lingkungan	Jumlah inovasi lingkungan yang dikoordinasikan dan ditindaklanjuti	Padang	10 inovasi	35.000.000			10 inovasi	35.000.000
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	jumlah rangkaian acara edukasi dan kampanye lingkungan hidup	Padang	2 iven	150.000.000			2 iven	150.000.000
<b>Program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional</b>	<b>Meningkatkan pengelolaan TPA Sampah Regional</b>			<b>100.000.000</b>				<b>7.700.000.000</b>
Pemantauan kualitas lingkungan kawasan TPA Sampah Regional	Jumlah laporan kawasan lingkungan TPA Sampah Regional yang dipantau	Payakumbuh dan Kota Solok	4 Laporan	10.000.000			4 Laporan	200.000.000
Peningkatan pembangunan Infrastruktur TPA Regional	Tersedianya infrastruktur di TPA Sampah Regional	Payakumbuh dan Kota Solok	2 lokasi	20.000.000			2 lokasi	1.300.000.000
Pengendalian dan operasional UPTD TPA Sampah Regional	Terlaksananya operasional TPA	Payakumbuh dan Kota Solok	2 TPA	30.000.000			2 TPA	6.200.000.000
Penyusunan dokumen kajian pengembangan TPA sampah regional		payakumbuh	3 dokumen	20.000.000			-	-
Pembebasan lahan pengembangan TPA regional	Jumlah paket dokumen kajian pengembangan TPA Tersedianya lahan pengembangan di TPA sampah regional	payakumbuh	2 lokasi	20.000.000			-	-

## IV

## PENUTUP

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 merupakan penjabaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 - 2021 dan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 2005-2025.

RENJA-OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 merupakan pedoman/acuan bagi unit kerja lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana kegiatan pada bidang-bidang dan sekretariat pada OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan pembangunan lingkungan hidup 2019 dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku serta mempedomani arahan perencanaan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat berkewajiban untuk melaksanakan RENJA-OPD ini sesuai dengan yang termuat di dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat.
3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup berkewajiban menjamin konsistensi antara rancangan RPJM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020 dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 – 2021.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RENJA-OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban untuk melakukan pemantauan pelaksanaannya.